

SISTEM TATA KELOLA LAHAN HUTAN SECARA TRADISIONAL MASYARAKAT ADAT GENDANG WASO DI KECAMATAN LANGKE REMBONG KABUPATEN MANGGARAI

*Traditional Forest Land Management System Of Gendang Waso Traditional
Community In Langke Rembong Sub District Manggarai Regency*

**Vinsensia Dolorosa Golu Ruron, Ludji Michael Riwu Kaho, Elisa Iswandono, dan
Nixon Rammang**

Program Studi Kehutanan
Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana

ABSTRACT. The traditional forest land management system is a form of local wisdom and *tradition* of the *gendang waso* indigenous community that has been passed down from generation to generation. The purpose of this study is to analyze the traditional land management system, identify the impact of modernization on traditional land management patterns, explain adaptation strategies, and explain opportunities for integration between local wisdom-based land management systems and conservation policies in the Ruteng TWA to support ecosystem sustainability. This study uses a qualitative method with a 10-aspect ethnographic approach and data collection through in-depth interviews, participatory observation, documentation and mapping of traditional land management. The results of this study are the traditional land management system applied by the *gendang waso* indigenous community in the Bangka Poa forest through the Barong Wae, Barong Lodok and Penti rituals, the impact of modernization has experienced a major shift in land management, community adaptation strategies accept and adapt, and there are 3 aspects that need to be integrated. The traditional forest land management system implemented in the Ruteng TWA area has proven to be very effective, showing that traditional patterns are still relevant as an ecological balance

Keywords: Land Management, Traditional Traditions, Ruteng Nature Tourism Park..

ABSTRAK. Sistem tata kelola lahan hutan secara tradisional merupakan bentuk kearifan lokal serta tradisi dari masyarakat adat *gendang waso* yang telah diwariskan secara turun temurun. Tujuan dari penelitian ini yaitu Menganalisis sistem tata kelola lahan secara tradisional, Mengidentifikasi dampak modernisasi terhadap pola pengelolaan lahan tradisional, Menjelaskan strategi adaptasi, dan Menjelaskan peluang integrasi antara sistem pengelolaan lahan berbasis kearifan lokal dengan kebijakan konservasi di TWA Ruteng untuk mendukung keberlanjutan ekosistem. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dengan pendekatan 10 aspek etnografi serta pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi dan pemetaan pengelolaan lahan tradisional. Hasil dari penelitian ini yaitu Sistem tata kelola lahan secara tradisional yang diterapkan oleh masyarakat adat *gendang waso* di hutan *bangka poa* melalui ritual *Barong Wae*, *Barong Lodok* dan *Penti*, dampak modernisasi mengalami pergeseran besar dalam pengelolaan lahan, strategi adaptasi masyarakat menerima dan beradaptasi, dan terdapat 3 aspek yang perlu diintegrasikan. Sistem tata kelola lahan hutan secara tradisional di kawasan TWA Ruteng yang dijalankan terbukti sangat efektif, ditunjukkan bahwa pola tradisional masih relevan sebagai penyeimbang ekologis.

Kata kunci: Tata Kelola Lahan, Tradisi Tradisional, Taman Wisata Alam Ruteng.

Penulis untuk korespondensi, surel : vinsensiaruron@gmail.com

PENDAHULUAN

Lahan bagi masyarakat Manggarai tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya yang diatur melalui berbagai aturan adat. Oleh karena itu, pengelolaan lahan harus dilakukan secara bijaksana untuk memastikan

pemanfaatannya dapat mewujudkan ruang yang lebih produktif dan berkelanjutan (Hida, 2020). Seiring dengan perkembangan zaman dan laju modernisasi, terutama di pusat-pusat kota seperti Ruteng, sistem pengelolaan lahan berbasis tradisi menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan pola pemanfaatan lahan, alih

fungsi lahan, serta masuknya teknologi dan kebijakan konservasi formal kawasan konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng.

Dalam budaya Manggarai, istilah "*Gendang*" merujuk pada satu wilayah kampung dengan rumah adat sebagai pusatnya. Di *Gendang Waso*, terdapat bentuk pengelolaan lahan hutan yang dikenal sebagai "*Pong*," yaitu hutan larangan yang berfungsi sebagai wilayah konservasi alami. Keberadaan hutan larangan ini memiliki keterkaitan erat dengan sistem pengelolaan berbasis adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip keberlanjutan. Keberadaan *Pong* di kawasan konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng menciptakan dinamika unik antara sistem pengelolaan berbasis adat dan kebijakan konservasi pemerintah.

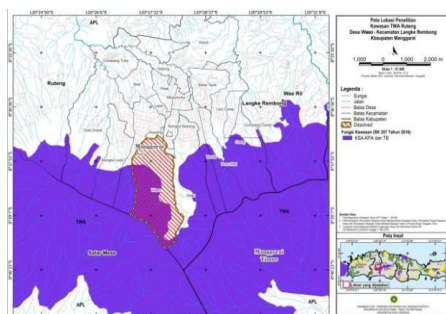
Pengelolaan lahan yang efektif dan efisien membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang diwariskan oleh leluhur (Ardiyanto, 2019). Oleh karena itu, agar kearifan lokal tetap lestari, masyarakat harus tetap aktif dalam pemanfaatan dan pengelolaan lahan berbasis tradisi, sehingga kelestarian ekosistem dapat terus dipertahankan (Uju, 2019).

Dalam konteks pengelolaan hutan, kearifan lokal sering kali diwujudkan dalam bentuk aturan adat, mitos, dan larangan-larangan tertentu yang berfungsi sebagai mekanisme pengendalian pemanfaatan sumber daya alam (Setiawan, 2021). Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana masyarakat adat *Gendang Waso* menyesuaikan sistem tata kelola lahan mereka terhadap tantangan modernisasi.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Agustus - November 2024.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi meliputi asal-usul, penyebaran suku bangsa, pengembaraan, struktur dan komposisi kependudukan, ciri biofisik, bahasa, istilah silsilah, perkawinan dan kekerabatan, kepercayaan dan agama serta kepemimpinan (Iswandono, 2018).

Teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam (*in depth interview*), Observasi Partisipatif (*participant observation*), Dokumentasi, dan Pemetaan Pengelolaan Lahan Tradisional. Penentuan informan berdasarkan petunjuk awal pada pemilihan informan kemudian merekomendasikan informan lain hingga sampai pada akhir titik jenuh (*snowball sampling*). Teknik analisis menggunakan Analisis secara deskriptif, menurut Miles dan Huberman (1992) dan dibagi menjadi tiga alur (Hardani, 2020) termasuk tahap reduksi, penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Lokasi Penelitian

Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng merupakan satu kawasan konservasi yang secara administrasi terletak di kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Secara geografis Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng terletak pada koordinat 8°30'- 8°42' LS dan 120°15'- 120°50' BT. Luas wilayah 32. 245,6 Ha. Potensi dari kawasan Taman Wisata Alam Ruteng (TWA) meliputi Flora, Fauna dan Sumber mata air. Kelurahan Waso merupakan salah satu kelurahan yang berada pada bagian barat di Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan luas wilayah 357,58 Ha.

Tabel 1. Luas Wilayah Kelurahan Waso

No	Jenis dan Manfaat	Luas (Ha)
1.	Hutan	11, 06
2.	Ladang	133, 19
3.	Padang rumput	0,89
4.	Pemukiman	124, 48
5.	Semak belukar	87, 96
	Total	357,58

Sumber : Data Kelurahan Waso, 2024

Perubahan Tutupan Lahan di Kelurahan Waso

Berdasarkan data tutupan lahan dari tahun 1993 hingga 2024, dapat dilihat adanya dinamika perubahan penggunaan lahan di wilayah Kelurahan Waso yang mencerminkan interaksi antara proses alam, pertumbuhan penduduk, dan pengaruh modernisasi. Luas total wilayah relatif tetap, yaitu sekitar 5.941 Ha, menunjukkan bahwa perubahan lebih banyak terjadi dalam bentuk alih fungsi lahan antar kategori.

Vegetasi pohon mengalami fluktuasi signifikan. Pada tahun 1993, luas vegetasi pohon tercatat sebesar 1.922,90 Ha dan meningkat drastis hingga mencapai puncaknya pada tahun 2019 sebesar 3.117,40 Ha. Namun, pada 2024, terjadi penurunan menjadi 2.446,90 Ha. Hal ini dipengaruhi oleh kejadian kebakaran hutan yang signifikan pada tahun 2014. Namun, upaya pemulihan dilakukan melalui program reboisasi yang berlangsung pada tahun 2017 dan 2018, yang mendorong peningkatan kembali vegetasi pohon hingga mencapai puncaknya pada tahun 2019. Tetapi pada periode Agustus 2019 terjadi kebakaran hutan yang menyebabkan kerusakan pada sebagian area reboisasi. Untuk menanggulangi dampak tersebut, kegiatan reboisasi kembali dilakukan pada November 2019 guna memulihkan tutupan lahan dan mendorong stabilitas ekosistem. Penurunannya kembali pada 2024 bisa dikaitkan

dengan konversi lahan untuk permukiman atau pertanian.

Penurunan tajam pada areal permukiman setelah 1993 mungkin akibat adanya relokasi penduduk atau redefinisi batas wilayah permukiman, sedangkan peningkatan di 2024 mencerminkan tekanan urbanisasi dan pertumbuhan penduduk.

Lonjakan padang rumput setelah penurunan pada 2014 dan 2019 ini bisa jadi akibat pembukaan kembali lahan untuk penggembalaan atau perubahan fungsi dari semak belukar dan areal terbuka ke padang rumput, atau akibat regenerasi alami.

Areal terbuka (kering) menunjukkan penurunan drastis dari 983,7 Ha pada 1993. Namun, luas ini kembali meningkat secara bertahap hingga mencapai 427,1 Ha pada 2024. Fluktuasi ini bisa disebabkan oleh perubahan musiman, degradasi lahan, atau aktivitas pembangunan yang belum tertutup vegetasi secara penuh.

Semak belukar mencatat lonjakan besar antara 1993 (1.509,70 Ha) dan 2014 (2.662,60 Ha), yang kemudian menurun pada tahun-tahun berikutnya menjadi 1.730,60 Ha pada 2024. Peningkatan awal ini bisa disebabkan oleh degradasi vegetasi pohon atau regenerasi alami lahan yang sebelumnya terbuka, sementara penurunan selanjutnya mungkin menunjukkan konversi ke jenis tutupan lain, seperti vegetasi pohon atau padang rumput.

Tabel 2. Perubahan Tutupan Lahan di Kelurahan Waso

Jenis Tutupan Lahan	Luas Tutupan Lahan (Ha)			
	1993	2014	2019	2024
Vegetasi Pohon	1.922,90	2.344,70	3.117,40	2.446,90
Areal Permukiman	782,8	272,6	252,9	531,6
Padang Rumput	742,5	578,9	385,1	785,2
Areal Terbuka (Kering)	983,7	82,7	360,7	427,1
Semak Belukar	1.509,70	2.662,60	1.825,40	1.730,60
Jumlah	5.941,60	5.941,50	5.941,50	5.921,40

Sumber : Data Primer setelah di olah, 2025

Budaya Masyarakat Waso

Asal Usul Masyarakat Waso

Pada zaman dahulu para leluhur/ nenek moyang mereka menetap dalam wilayah hutan *Bangka Poa* yang sangat tertutup dengan vegetasi hutan yang sangat lebat dengan nama kampung *Tere*. Wilayah ini saat ini telah menjadi Kawasan konservasi Taman Wisata Alam Ruteng.

Penyebaran Masyarakat

Setelah berpindah keluar dari kawasan hutan *bangka poa* beralihlah nama kampung *Tere* menjadi *Waso* dan menetap sampai sekarang. Dalam hal perpindahan ini ada juga masyarakat yang menyebar ke dua tempat penyebaran yakni penyebaran ke *Pau* dan *Nekang* yang masih berada dalam kecamatan Langke Rembong.

Pengembaraan

Masyarakat Waso merupakan campuran dari penduduk asli manggarai dan etnis yang meliputi penduduk Ngada/Nagekeo, Ende, Sikka, Flores Timur, Sumba, Timor, Alor, Jawa, Sumatera, NTB, dan Bali. Setiap penduduk yang masuk dan bergabung, harus menyesuaikan aturan sesuai dengan adat yang berlaku di Rumah *Gendang*.

Ciri Biofisik

Mayoritas penduduk flores berasal dari ras weddoid. Akan tetapi, suku manggarai memiliki keunikan karena memiliki perpaduan ciri fisik dan budaya dari ras melanesia dan weddoid (Iswandono, 2018). Percampuran antara penduduk asli flores dan pendatang dari wilayah bagian barat indonesia menghasilkan orang manggarai dengan ciri khasnya kulit sawo matang, rambut bergelombang maupun keriting dan memiliki tinggi badan sedang hingga tinggi. Ciri biofisik dari orang waso merupakan keturunan asli dari nenek moyang dan sesuai dengan nenek moyang.

Bahasa

Menurut Verheijen (1991) dalam Iswandono (2018) bahasa manggarai yang digunakan memiliki banyak dialeg yaitu Waerena, Rembong, Kempo, Rajong, Komodo dan Manggarai kuku. Dialek waerena di Manggarai Tenggara, Rembong di Rembong yang wilayahnya mencakupi ke

arah Ngada Utara, kempo di wilayah kempo Manggarai bagian Barat, rajong di wilayah rajong, komodo di pulau komodo dan Manggarai kuku yang termasuk dari lima kelompok dari dilaeg yang ada, serta meliputi juga dari Manggarai Timur jauh. Bahasa yang digunakan dalam keseharian masyarakat waso adalah bahasa Manggarai kuku.

Kepemimpinan

Berdasarkan hasil dari data primer dari setiap pembagian tersebut masing-masing berperan sesuai dengan status kepemimpinannya. *Tua Golo* berperan sebagai pemimpin *beo* atau kampung yang berfungsi sebagai mengatur semua masyarakat. *Tua Teno* berperan dalam pemimpin pembagian dan menjaga hak lahan atau *lingko*, *lodok* (tanah adat). *Tua Panga* (kepala suku) dan *Tua Kilo* (kepala keluarga) berperan dalam hal yang sama sebagai kepala di setiap keturunan yang berfungsi untuk mengatur dan mengurus keluarga. *Tua panga* sama dengan *tua kilo* yang memimpin satu garis keturunan dari Ayah.

Istilah- Silsilah

Dalam budaya Manggarai, sapaan didasarkan pada hubungan kekerabatan adalah hal yang paling umum. Hal ini disebabkan oleh penggunaan kata sapaan kekerabatan yang tidak hanya terbatas pada anggota keluarga, tetapi juga digunakan untuk menyapa orang lain yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan.

Perkawinan dan Kekerabatan

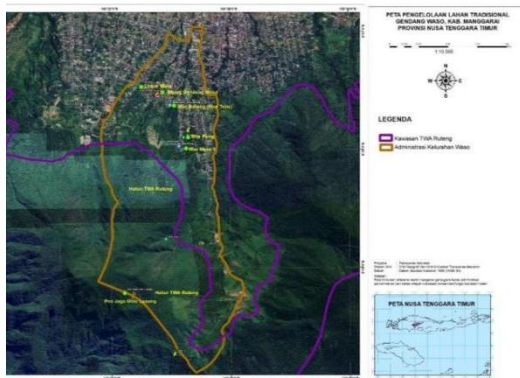
Perkawinan dalam budaya Manggarai tidak bisa dipisahkan dari aspek *woenelu* atau kekerabatan, yang di dalamnya terciptanya hubungan antara kedua keluarga melalui perkawinan. *Kawing tungku* merupakan perkawinan antara *anak rona* dan *anak wina* sepupu kandung yang bertujuan untuk mempererat dan mempertahankan hubungan keluarga. *Kawing cako* merupakan perkawinan sambung secara satu garis keturunan darah. Perbedaan utama antara perkawinan *tungku* dan *cako* terletak pada hubungan kekerabatan antara pasangan. *Tungku* melibatkan sepupu kandung sedangkan *cako* melibatkan satu garis keturunan darah anggota suku yang sama, tetapi dengan hubungan kekerabatan yang lebih jauh pada generasi ketiga maupun keempat. *Kawing*

Cangkang yaitu perkawinan yang terjadi antara *anak rona* dan *anak wina* di luar garis keturunan darah maupun kerabat.

Sistem Tata Kelola Lahan secara Tradisional

Masyarakat *gendang waso* memiliki pembagian lahan pengelolaan lahan secara tradisional. Setiap bagian lahan yang dikelola tersebut dilakukan upacara adat. Luas wilayah *Pong Bangka Poa* yang saat ini menjadi kawasan TWA Ruteng adalah 341,123 Ha.

Dalam pengelolaan lahan tradisional tersebut terdapat sanksi adat. Sanksi adat diberlakukan untuk pelanggaran terhadap aturan lingkungan, seperti menebang pohon pada wilayah *pong*. Jika diketahui sanksi ringan yang diberikan berupa teguran, tetapi jika melanggar tiga kali berturut-turut maka pihak yang bersangkutan dilaporkan dan di bicarakan di rumah *gendang* untuk membicarakan sanksi yang akan diterima oleh pihak yang bersangkutan. Sanksi adat yang biasanya di kenakan berupa "*ela wase lima agu ca botol tuak* atau seekor babi berukuran besar dan sebotol tuak atau arak".



Gambar 2. Peta Hasil Penelitian

Pembagian lahan beserta upacara adat yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Lingko

Struktur *lingko* berbentuk melingkar dengan titik pusatnya dibagi ke berbagai arah menyerupai irisan kue atau segitiga yang disebut *moso*. Pada pusat *lingko* dilakukan upacara *barong lodok*. *Barong* diartikan sebagai panggilan, mengundang, sedangkan *lodok* merupakan pusat dari *lingko* atau kebun. Ritual ini bertujuan untuk memanggil dan mengundang roh penjaga *lodok* agar bergabung dalam perayaan *penti*.

Wae teku dan Barong Wae

Wae teku adalah mata air yang biasa dilakukan pengambilan air oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Mata air yang dilakukan upacara adat setiap tahun disebut dengan *wae barong* sedangkan upacara adatnya disebut dengan ritual *Barong Wae*. Ritual *Barong wae* merupakan upacara pemberian sesajian kepada leluhur penjaga mata air yang biasa dilakukan secara rutin, terorganisir, dan sakral serta wajib dilaksanakan setiap tahun pada upacara *penti*. Dengan seluruh rangkaian ritual adat *barong wae* masyarakat bersyukur dan berterima kasih atas pemberian mata air tersebut dengan artian dari istilah kalimat yang diucapkan dalam ritual yaitu *kembus wae teku*, *mboas wae woang* yang bermakna dalam konteks pelestarian dan perlindungan terhadap mata air agar air tetap mengalir dan melimpah karena sumber kehidupan adalah air minum.

Kampung Adat

Pada wilayah ini juga biasa terdapat *compang* atau tempat persembahan dari susunan batu berbentuk lingkaran. Upacara adat yang dilakukan setiap tahun yang dilaksanakan di wilayah ini adalah upacara *penti*. *Penti* merupakan upacara adat Budaya Manggarai yang mensyukuri dan berterima kasih kepada Yang Kuasa dan leluhur. Upacara *penti* di pimpin dan di pandu oleh *tua golo* dan di bantu oleh *tua-tua panga*. Hewan sesajian utama dari upacara *penti* adalah *kaba* atau kerbau.

Tujuan dari upacara *penti* yaitu :

1. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Manggarai akan pentingnya bersyukur kepada *mori kraeng* dan *empo* atau leluhur.
2. Untuk mempererat tali persaudaraan antar keluarga melalui acara syukuran yang penuh makna adat.
3. Agar masyarakat menjadi lebih memahami pentingnya kesatuan tata ruangbudaya Manggarai melalui penyelenggaraan acara syukuran. Tata ruang meliputi : *beo* atau *golo* (kampung), *natas labar* (halaman untuk bermain), *mbaru ka'eng* (kediaman, tempat tinggal), *compang te somba* (altar/ tempat sesajian), *wae teku* (air minum), dan *lodok* atau *lingko* (kebun).

Pong.

Pong adalah hutan keramat yang seharusnya tidak boleh dimanfaatkan. Namun pada wilayah Waso, wilayah yang disebut *Pong* adalah wilayah *Bangka* atau kampung lama yang kemudian disebut *Pong Bangka Poa*. Kampung lama atau bangka di Gendang Waso seluas 341,12 Ha yang saat ini telah masuk dalam wilayah kawasan hutan TWA Ruteng.

Dampak Modernisasi terhadap Sistem Pengelolaan Lahan Tradisional

Pada masa lalu pembagian lahan secara tradisional didasarkan pada sistem *lingko* yang berbentuk jaring laba-laba yang berpusat pada sebuah titik yang disebut *lodok* dan kebun sistem kotak seperti biasa. Bila pada bagian tengah lingko terdapat tempat pemujaan maka disebut *lingko rame*, bila tidak ada tempat pemujaan disebut *lingko bon* dan bila kebun berbentuk kotak seperti kebun lainnya disebut *lingko neol*.

Pada saat ini pembagian kebun bundar (*lingko*) oleh tu'a teno seperti masa lalu sudah tidak lagi dilaksanakan karena semua tanah sudah dibagi habis. Tanah warisan yang diwariskan semakin hari semakin lebih kecil bagian yang diterima. Gambar berikut menunjukkan wilayah *lingko* yang saat ini telah menjadi perubahan dengan tetap memperlihatkan ciri khas bentuk sarang laba-laba.



Gambar 3. Wilayah kebun bundar (*lingko*) yang sudah menjadi perumahan di Gendang Waso.

Beberapa dekade terakhir, modernisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pengelolaan lahan di Manggarai.



Gambar 4. Peta Wilayah hutan *Bangka Poa*

Saat jumlah penduduk terus berkembang, terutama di kawasan perkotaan, kebutuhan akan ruang hidup, infrastruktur, dan fasilitas lainnya meningkat pesat (Dzakiya et al., 2019). Hal ini mempengaruhi bagaimana lahan digunakan dan dikelola. Oleh karena itu, untuk mencapai keseimbangan antara pelestarian dan pembangunan lahan, pengelolaan lahan yang berkelanjutan memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi yang mempertimbangkan aspek budaya, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Pengaruh Pola Tradisional terhadap Perubahan Kondisi Hutan

Pola pengelolaan hutan berbasis tradisi yang telah dijalankan oleh masyarakat Gendang Waso selama berabad-abad memiliki pengaruh langsung terhadap kondisi tutupan hutan dari waktu ke waktu. Ritual adat seperti *Barong Lodok*, *Barong Wae*, dan *Penti* bukan hanya sarana spiritual, tetapi juga sistem pengendalian sosial dan instrumen konservasi.

Dalam perspektif Ostrom (1990), pola ini merupakan bentuk pengelolaan *common pool resources* yang berhasil karena adanya institusi lokal yang kuat. Namun ketika modernisasi melemahkan institusi tersebut dan akses masyarakat terhadap hutan dibatasi secara formal, terjadi kehilangan rasa tanggung jawab dan kontrol sosial.

Sebagaimana dikemukakan Hardin (1968), penutupan akses masyarakat terhadap hutan tanpa pengawasan dapat mengarah pada kondisi *open access*, di mana tidak ada pengelolaan aktif dan sumber daya cenderung terkuras. Sementara itu, menurut Peluso (2003), akses terhadap sumber daya bukan hanya soal hak legal, tetapi juga berkaitan dengan kekuasaan,

pengetahuan, jaringan sosial, dan legitimasi. Ketika sistem adat tidak diakui secara formal, maka kemampuan masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya pun ikut melemah. Meski demikian, nilai-nilai konservasi dalam budaya lokal belum sepenuhnya punah. Beberapa kawasan *pong* tetap utuh dan dihormati, menjadi bukti bahwa pola tradisional masih relevan sebagai penyeimbang ekologis.

Strategi Adaptasi Masyarakat terhadap Pengaruh Modernisasi

Modernisasi yang melanda wilayah Manggarai, khususnya di Gendang Waso, telah membawa perubahan besar terhadap sistem sosial, budaya, dan tata guna lahan masyarakat. Di tengah perubahan tersebut, masyarakat Manggarai tetap mempertahankan nilai-nilai dasar budaya mereka dengan cara mengintegrasikan elemen adat ke dalam konteks kehidupan modern. Secara keseluruhan, adaptasi masyarakat Manggarai terhadap modernisasi bersifat dinamis dan selektif. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi tidak selalu berarti penghapusan tradisi, tetapi bisa menjadi peluang untuk menegosiasikan ulang hubungan antara budaya, ruang, dan pembangunan. Secara garis besar strategi adaptasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Legalitas dan Sertifikasi Tanah

- Masyarakat mulai menerima program sertifikasi tanah sebagai bentuk pengakuan hukum terhadap hak milik individu.
- Sistem kepemilikan tanah yang dulunya komunal (*lingko*) berubah menjadi hak milik pribadi sesuai hukum nasional.

2. Pelestarian Simbol dan Praktik Budaya

- Meskipun sistem *tu'a teno* tidak lagi berfungsi dalam pembagian tanah, perannya tetap dijaga dalam upacara adat dan struktur sosial.
- Rumah adat (mbaru gendang) tetap difungsikan sebagai pusat kegiatan adat dan simbol kebersamaan klan.

3. Integrasi Nilai Adat dalam Kehidupan Modern

- Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap leluhur masih dipraktikkan dalam konteks kehidupan modern.
- Tradisi budaya diajarkan secara informal kepada generasi muda melalui kegiatan keluarga dan komunitas.

4. Adaptasi Pola Pemukiman

- Meskipun pola pemukiman berubah mengikuti pembangunan jalan dan infrastruktur, masyarakat tetap menjaga kedekatan berdasarkan klan.
- Perumahan modern dibangun di atas tanah adat tetapi tetap memperhatikan batas-batas warisan keluarga.

5. Diversifikasi Ekonomi

- Peralihan dari pertanian subsisten ke sektor jasa, perdagangan, dan kegiatan ekonomi lain tanpa meninggalkan sepenuhnya tradisi bertani.
- Pemanfaatan tanah warisan secara produktif sesuai kebutuhan ekonomi kontemporer.

6. Perlindungan Ruang Simbolik dan Sakral

- Area bekas *lingko rame* yang memiliki nilai spiritual berusaha dipertahankan dari alih fungsi menjadi kawasan bisnis atau hunian.
- Ruang-ruang ini dijaga sebagai bagian dari identitas budaya dan warisan leluhur.

7. Pemanfaatan Teknologi dan Infrastruktur Secara Selektif

- Teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup (akses air, listrik, transportasi), tetapi tetap disesuaikan dengan norma sosial lokal.
- Pembangunan infrastruktur diupayakan tidak merusak struktur sosial dan nilai-nilai adat.

8. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Budaya Lokal

- Masyarakat mulai menyadari pentingnya mendokumentasikan dan mengajarkan budaya Manggarai dalam konteks modernisasi.
- Kegiatan budaya seperti festival, pelatihan adat, dan diskusi komunitas

menjadi media pelestarian identitas lokal.

Integrasi Kearifan Pengelolaan Lahan Tradisional Ke Dalam Konservasi

Dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, integrasi bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang selaras antara masyarakat adat dan pihak pengelola. Kay dan Alder (1999) mengidentifikasi tiga bentuk integrasi, yaitu kebijakan, sistem, dan fungsional. Pendekatan ini sejalan dengan teori common pool resources (CPRs) dari Elinor Ostrom (1990), yang menyatakan bahwa hutan adalah sistem sumber daya bersama dengan batas yang sulit dikontrol secara eksklusif. Karena itu, pengelolaan yang bersifat top-down dan menutup akses masyarakat adat sering kali tidak efektif. Bahkan menurut Hardin (1968), penutupan akses tanpa pengaturan justru menciptakan kondisi *open access*, di mana tidak ada aktor yang merasa bertanggung jawab menjaga sumber daya tersebut, sehingga terjadi degradasi. Peluso (2003) kemudian memperluas pemahaman ini dengan memperkenalkan teori akses yang membedakan antara “hak” dan “kemampuan” untuk memperoleh manfaat dari sumber daya.

Aspek penting pengelolaan lahan tradisional yang perlu diintegrasikan ke dalam konservasi :

1. Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan

Masyarakat menjaga kawasan larangan adat seperti *Pong Bangka Poa* dan memberlakukan sanksi adat yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya memiliki *hak moral*, tetapi juga *kemampuan sosial dan kelembagaan* untuk mengatur dan menegakkan aturan.

2. Pengawetan Spesies Tumbuhan dan Satwa

Larangan menebang *Ficus variegata* di sekitar mata air mencerminkan pemahaman ekologis dan spiritual yang tinggi. Tanaman ini berfungsi sebagai spesies eko-kultural dan menjadi penyangga keseimbangan ekosistem.

3. Pemanfaatan Berkelanjutan

Ritual *barong lodok* dan *barong wae* tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga memperkuat mekanisme kontrol sosial atas

pemanfaatan lahan dan sumber air. Melalui upacara ini, masyarakat mentransmisikan nilai konservasi secara intergenerasional.

Namun demikian, praktik-praktik lokal ini menghadapi tantangan dari regulasi konservasi formal, seperti:

- **UU No. 5 Tahun 1990** yang menekankan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari, namun belum secara eksplisit mengakomodasi sistem adat sebagai mitra setara dalam konservasi.
- **Permen LHK No. P.76/MenLHK-Setjen/2015** yang seharusnya membuka ruang melalui pengaturan blok tradisional dalam taman wisata alam, namun dalam implementasinya masih sering mengabaikan peran adat.

Dalam kerangka teori Peluso, masyarakat adat sering tidak memiliki *bundle of powers* yang cukup untuk **mengakses, mengontrol, atau mempertahankan** sumber daya hutan mereka sendiri. Meskipun secara de facto mereka menjaga dan memanfaatkannya secara lestari, secara de jure mereka tidak memiliki otoritas formal yang diakui negara.

Dengan merujuk pada teori Ostrom, Hardin, dan Peluso, menjadi jelas bahwa tanpa legitimasi sosial dan distribusi kekuasaan yang adil, konservasi tidak akan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut :

1. Sistem tata kelola lahan secara tradisional yang diterapkan oleh masyarakat adat *gendang waso* dihutan *bangka poa* melalui ritual *Barong Wae*, *Barong Lodok* dan *Penti*, yang merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat waso. Ritual-ritual ini memperkuat hubungan masyarakat dan menghormati leluhur dan Tuhan secara spiritual. Ritual-ritual ini terus dilakukan dengan konsisten sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi, yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan

- pelestarian alam dan budaya. Sanksi adat masih berlaku di masyarakat Waso sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi dan nilai-nilai leluhur, meskipun ada perubahan karena urbanisasi dan modernisasi. Sanksi adat digunakan untuk mengontrol masyarakat dan lingkungan, seperti menjaga kelestarian alam, seperti melarang penebangan pohon di area *pong*.
2. Pengaruh modernisasi di Masyarakat waso telah mengalami pergeseran besar dalam pengelolaan lahan. Hal ini beralih dari sistem kepemilikan tanah adat yang berbasis komunal (*lingko*) ke kepemilikan tanah yang lebih bebas dimiliki oleh individu. Perubahan ini, mengancam hilangnya sistem tradisional seperti *lingko* yang memiliki nilai budaya dan ikatan sosial yang kuat. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan kebutuhan ekonomi yang semakin berkembang telah mengubah lanskap pertanian tradisional menjadi lebih urban, yang menghadirkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara adat dan modernisasi. Oleh karena itu untuk memastikan pengelolaan lahan di Waso tetap berkelanjutan dan berakar pada tradisi lokal, kebijakan yang dapat mengintegrasikan kepentingan modernisasi dengan pelestarian budaya diperlukan. Untuk mencapai keseimbangan ini, sangat penting untuk menggunakan pendekatan pengelolaan lahan secara tradisional yang menyeluruh dan terintegrasi yang mempertimbangkan elemen budaya, sosial, ekonomi, dan lingkungan.
 3. Strategi Adaptasi dari masyarakat Manggarai menunjukkan kemampuan adaptasi yang dinamis terhadap modernisasi dengan cara mempertahankan nilai-nilai budaya lokal serta menyerap unsur modern yang sesuai. Masyarakat tetap menjaga identitas adat melalui pelestarian simbol-simbol budaya, integrasi dalam upacara adat, dan pengelolaan ruang hidup yang selaras dengan prinsip lokal. Modernisasi tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk menegosiasi kembali hubungan antara tradisi, ruang, dan pembangunan secara berkelanjutan.
 4. Peluang integrasi antara sistem pengelolaan lahan berbasis kearifan lokal dengan kebijakan konservasi di Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng dengan memastikan bahwa program pengelolaan kawasan konservasi berjalan selaras dengan kearifan lokal masyarakat adat, integrasi kebijakan, sistem, dan fungsional sangat penting. Integrasi kebijakan memastikan bahwa program konservasi dapat mendukung prinsip-prinsip budaya dan tradisi masyarakat adat, sementara integrasi sistem mengarahkan strategi konservasi untuk melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menerapkan 3 aspek penting dalam pengelolaan lahan secara tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardin G. 1968. *The Tragedy of the Commons*. Science Vol. 162. www.sciencemag.org
- Hida, M. K. (2020). Analisis Tata Kelola Ruang Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Pembangunan Komplek Gedung Sekolah SMP Dan SMA IT Ishanul Fikri Magelang (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Setiawan, E., et al. (2021). "Peran Masyarakat Sekitar Desa Penyangga Dalam Konservasi Taman Nasional Alas Purwo Berbasis Kearifan Lokal." *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 10 (1), 19–43.
- Ardiyanto, D., & Nadiro, N. (2019). Pengelolaan Lahan Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Penglipuran. *Jurnal Green Growt dan Manajemen Lingkungan*, 8(2) : 80-89. .
- Dzakiya, M, N., Subiyanto, S., & Amarrohman. F.J. (2019). Analisis Perkembangan dan Pola Permukiman Di Wilayah Kecamatan Perbatasan Kota Semarang Dan Kabupaten Kendal. *Jurnal Geodesi Undip*, 8(4) 123-132.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J. Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R.

- (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta : Cv. Pustaka Ilmu. *Jurnal Biotropikal Sains*, vol 16(1) : 1-11.
- Iswandono, Elisa. (2018). Budaya Konservasi Masyarakat Manggarai. 1-95.
- Iswandono, Elisa. (2016). Integrasi Kearifan Lokal Masyarakat Suku Manggarai Dalam Konservasi Tumbuhan Dan Ekosistem Pegunungan Ruteng Nusa Tenggara Timur.
- Kay, R., & Alder, J. (1999). Coastal management and planning. *E & FN SPON, New York*, 375.
- Ostrom E. 1990. *Governing The Commons : The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge Univ Pr.
- Uju, G. F., Bhuja, P., & Boro, T. L. (2019). Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lindung Di Kampung Wae Rebo, Desa Satar Lenda, Kabupaten Manggarai.